

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ERA JOE BIDEN
TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN
SKRIPSI**



Oleh:

TADZQIA AULIANNISA RAMADHANI

19323191

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ERA JOE BIDEN
TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

TADZQIA AULIANNISA RAMADHANI

19323191

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ERA JOE BIDEN
TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
25 Agustus 2023

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
2. Hadza Min Fadhlil Robby, S.I.P., M.Sc.
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan




Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023



Tadziya Auliannisa Romadhani

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Joe Biden terkait program nuklir Iran. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menggambarkan evolusi kebijakan AS terhadap Iran dari penghentian program nuklir hingga perjanjian JCPOA yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan AS di bawah pemerintahan Biden, termasuk aliansi internasional, pertimbangan keamanan regional, dan dinamika diplomasi. Dengan menganalisis pidato, kebijakan resmi, dan tindakan taktis, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif tentang pendekatan AS dalam menghadapi isu sensitif ini, serta dampaknya terhadap stabilitas geopolitik di Timur Tengah.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Joe Biden, Program Nuklir Iran

ABSTRACT

This study analyzes the foreign policy of the United States in the era of Joe Biden regarding Iran's nuclear program. Through a descriptive-analytical approach, this research describes the evolution of US policy towards Iran from the cessation of the nuclear program to the JCPOA agreement abandoned by its predecessor. This research explores factors influencing changes in US policy under the Biden administration, including international alliances, regional security considerations, and diplomatic dynamics. By analyzing speeches, official policies, and tactical actions, this research presents a comprehensive picture of the US approach to this sensitive issue, as well as its impact on geopolitical stability in the Middle East.

Keywords: Foreign Policy, Joe Biden, Iran's Nuclear Program

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
i	
HALAMAN PENGESAHAN	
ii	
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	
iii	

DAFTAR ISI

iv

BAB I PENDAHULUAN.....

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Rumusan Masalah

7

1.3 Tujuan Penelitian

7

1.4 Cakupan penelitian

7

1.5 Tinjauan Pustaka

8

1.6 Kerangka Pemikiran

11

1.7 Argumen Sementara

13

1.8 Metode Penelitian

14

1.8.1 Jenis Penelitian

14

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

14

1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II POLICY INFLUENCERS PADA POLITIK AMERIKA SERIKAT TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM NUKLIR IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOE BIDEN	17
2.1 Bureaucratic Influencer	18
2.2 Partisan Influencer	22
2.3 Interest Influencer	26
2.4 Mass Influencer	28
BAB III KAPASITAS EKONOMI DAN MILITER SERTA KONTEKS INTERNASIONAL DALAM PEMERINTAHAN BIDEN TERKAIT PROGRAM NUKLIR IRAN	33
3.1 Kapasitas Ekonomi dan Militer Domestik	33
3.2 Konteks Internasional	41

Comment [T-1]: Policy Influencers pada Pol
Amerika Serikat terkait Kebijakan Program Nukl
Iran pada Masa Pemerintahan Biden

BAB 4 PENUTUP	
49	
4.1 Kesimpulan	
49	
4.2 Rekomendasi	
54	
DAFTAR PUSTAKA	
55	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Popularitas teknologi nuklir kian meningkat pasca berakhirnya Perang Dunia II. Negara di berbagai belahan dunia berbondong-bondong untuk mengembangkan teknologi nuklir dengan dalih meningkatkan stabilitas dan pengaruh negara. Tak terkecuali bagi negara di kawasan Timur Tengah yang sarat akan konflik seperti Iran. Namun, eksistensi program pengembangan teknologi nuklir milik Iran justru menambah daftar panjang konflik di kawasan tersebut, khususnya bagi kawasan Teluk Persia.

Pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran memulai program pengembangan teknologi nuklir sebagai sumber energi. Berdirinya Pusat Pengembangan Atom Universitas Teheran pada tahun 1956, menjadi awal aktivitas pengembangan teknologi nuklir milik Iran. Di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi, Iran menjadi salah satu koalisi Amerika Serikat. Melalui penandatanganan program "*Atoms for Peace*", Iran turut bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam proyek pengembangan nuklir tersebut. Selanjutnya Amerika Serikat memberikan pasokan Uranium sebesar 5.545-kilogram, 112 gram Plutonium, dan juga suplai tenaga kerja. Perkembangan proyek pengembangan nuklir milik Iran berjalan cukup lambat, hingga pada tahun 1960, Amerika Serikat menyediakan suplai reaktor riset ternal dengan daya sebesar 5 watt bagi Iran (Sundari, 2020).

Tujuan damai dalam pengembangan teknologi nuklir milik Iran ditunjukkan dengan penandatanganan *Nuclear non-Proliferation Treaty* (NPT) tahun 1968 dan mulai mengambil langkah untuk meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1970. Dengan begitu, Iran telah memiliki hak untuk mengembangkan, meneliti, memproduksi, dan menggunakan teknologi nuklir dengan tujuan damai (Craig & Ruzicka, 2013). Empat tahun selanjutnya, pada tahun 1974, Iran berhasil mendirikan *Atomic Energy Organization of Iran* (AEOI) dan memulai ekspansi penelitian serta kapasitas dari program penelitian nuklir tersebut.

Hubungan bilateral antara Iran dan Amerika Serikat berjalan cukup stabil hingga penghujung tahun 1974. Memasuki awal tahun 1975, timbul kecurigaan dari Amerika Serikat terhadap tujuan Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir. Berawal dari intensi Iran untuk membangun fasilitas daur ulang Plutonium di Teheran dengan tujuan pemenuhan aktivitas sipil dan militer, hal ini justru memicu kecurigaan Amerika Serikat yang berujung pada penangguhan sementara wacana kerja sama antar kedua negara. Hubungan bilateral Iran dan Amerika Serikat kian memburuk, hingga munculnya gerakan Revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini yang menumbangkan rezim Shah Reza Pahlevi pada 11 Februari 1979. Sejak jatuhnya kursi kepemimpinan ke tangan Ayatullah Khomeini, muncul narasi *anti-western* di dalam pemerintahan Iran (Agustina, 2019).

Khomeini memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Shah Reza Pahlevi. Pada saat itu, Iran yang telah resmi menjadi Republik Islam Iran, cenderung memfokuskan hubungan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi Islam. Program pengembangan nuklir dianggap sebagai alat neo-

kolonialisme bangsa Barat. Tak hanya itu, Iran juga bergabung ke dalam Gerakan Non-Blok. Kebijakan-kebijakan tersebut menuai respon agresif dari negara-negara Barat. Beberapa memilih untuk menghentikan kerja sama pengembangan nuklir dengan Iran. Amerika Serikat memulai langkah pemberhentian suplai uranium yang diikuti oleh Prancis, Inggris, dan Jerman (UE-3). Hal ini memaksa Iran untuk terus mencari mitra kerja sama baru demi keberlanjutan program pengembangan nuklir tersebut. Meski begitu, Iran tetap tidak mengindahkan sejumlah penolakan yang dilakukan oleh koalisinya. Bahkan di tahun 1984, Khomeini mengungkapkan wacana keberlanjutan pembangunan program pengembangan nuklir dengan mengharapkan bantuan internasional untuk membangun kembali reaktor di Bushehr. Namun, akibat banyaknya tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, Iran terpaksa membatalkan wacana pengadaaan kerja sama tersebut (Ni'matul, 2017). Negara-negara Eropa turut memberikan dorongan agar Iran bersifat kooperatif serta transparan terhadap aktivitas program pengembangan nuklirnya. Sehingga akhirnya Iran menyetujui penandatanganan protokol tambahan yang mengizinkan investigasi mendalam terkait aktivitas beserta fasilitas pengembangan nuklir milik Iran, dan penghentian sementara aktivitas pengayaan uranium di tahun 2003.

Namun, sikap kooperatif dan transparan milik Iran tidak bertahan begitu lama. Pada tahun 2006, di bawah pemerintahan Ahmadinejad, Iran kembali melanjutkan program pengembangan nuklir tanpa mengindahkan proposal penangguhan sementara milik IAEA, Amerika Serikat, dan juga UE-3. Tak hanya IAEA, PBB juga turut mengeluarkan sejumlah resolusi dan sanksi yang berujung

pada tuduhan adanya pengaruh Amerika Serikat dan Sekutu dalam keputusan Dewan Keamanan PBB (Andra, 2019).

Perseteruan Amerika Serikat dan Iran terkait program pengembangan nuklir memasuki babak baru pada masa pemerintahan Barack Obama. Berawal dari kekhawatiran Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, Jerman dan Prancis (P5+1) akan kebijakan luar negeri Iran yang kian agresif. Pada Maret tahun 2013, Amerika Serikat mengawali negosiasi dengan mengagendakan pertemuan secara tertutup bersama sejumlah pejabat Iran di Oman. Obama mengumumkan tujuan dari negosiasi tersebut adalah untuk mengontrol persebaran senjata nuklir di kawasan Timur Tengah dan memberikan kepastian bagi masyarakat internasional terkait sikap transparan dan kooperatif Iran dalam menolak pengembangan senjata nuklir. Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi kembali dengan P5+1 pada Agustus 2013. Satu bulan selanjutnya, Obama dan Rouhani kembali terlibat perbincangan telepon. Usai pembicaraan melalui sambungan telepon tersebut, Sekretaris Amerika Serikat, John Kerry dan juga Javad Zarif yang merupakan Menteri Luar Negeri Iran, terlibat perundingan untuk menentukan opsi kesepakatan (Auliani, 2013).

Usaha Amerika Serikat berujung pada tercetusnya perjanjian sementara terkait program nuklir, *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) antara Iran dan P5+1 di Jenewa pada tanggal 24 November 2013. Selanjutnya JCPOA disepakati secara resmi di Wina, Austria pada tanggal 14 Juli 2015. Secara singkat perjanjian tersebut berisi tentang penangguhan beberapa mekanisme dalam program pengembangan nuklir Iran dengan pengurangan sanksi ekonomi sebagai imbalan. Melalui laporan yang dikeluarkan IAEA, Iran menunjukkan

kepatuhannya terhadap ketentuan sementara JCPOA dengan mengurangi kapasitas pengayaan uranium sebesar 20%, yang akan dikurangi separuhnya untuk kemudian diperkaya menjadi 3,5%.

Kabar mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump, yang mengumumkan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA pada tanggal 8 Mei 2018. JCPOA dinilai memberikan kelonggaran terhadap Iran dengan mencabut sanksi ekonomi yang telah diterapkan sebelumnya. Amerika Serikat juga telah menawarkan sejumlah protokol tambahan yang berujung pada penolakan. Dengan begitu, adanya pemberlakuan ulang sejumlah sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Sanksi tersebut berkaitan dengan penjualan dan pembelian mata uang Iran, pemeliharaan rekening serta dana di luar wilayah Iran, dan pemberhentian beberapa kegiatan impor barang dari Iran ke Amerika Serikat. Ada pula beberapa sanksi terkait produk minyak bumi milik Iran (Abdillah, 2019).

Di bawah kepemimpinan Presiden baru Amerika Serikat, Joe Biden muncul dengan misinya untuk memperbaiki citra Amerika Serikat di mata internasional. Melalui penerapan orientasi kebijakan luar negeri yang berlandaskan "*the World's Beacon*", Biden menetapkan fokusnya pada perbaikan hubungan kerja sama multilateral yang sempat dikesampingkan pada masa pemerintahan Trump. Melalui kebijakan luar negeri yang berorientasi "*the World's Beacon*", diharapkan dapat mewujudkan posisi Amerika Serikat sebagai mercusuar bagi negara-negara berdaulat dalam menangani potensi ancaman internasional. Eksistensi program nuklir Iran dinilai sebagai salah satu ancaman bagi stabilitas nasional. Untuk itu, Biden mengupayakan perwujudan negosiasi bersama Iran (Nurtyandini, 2022).

Sejak masa kampanye, Biden telah menyuarakan janji untuk memulihkan hubungan bilateral Amerika Serikat dan Iran. Biden mengutarakan niat Amerika Serikat untuk kembali bergabung dalam keanggotaan JCPOA beserta penghapusan sanksi terhadap Iran, apabila Iran bersedia untuk bersikap kooperatif dengan mematuhi regulasi JCPOA yang telah disepakati bersama. Meskipun Biden menyebutkan upaya pemulihan perjanjian nuklir bersama Iran, sanksi-sanksi ekonomi warisan administrasi Trump tetap diberlakukan sebagai instrumen yang mengontrol aktivitas pengembangan nuklir Iran, sebelum adanya kesepakatan dalam negosiasi antara kedua negara. Meskipun telah mengupayakan berbagai agenda negosiasi, belum ada kesepakatan yang tercetus antara Amerika Serikat dan Iran. Hingga pada desember 2022 tersebar sebuah rekaman amatir yang memuat tanggapan Biden terhadap JCPOA. Dalam rekaman yang diambil pada november 2022, seorang wanita menanyakan kesediaan Biden untuk mengumumkan bahwa JCPOA sudah tidak berlaku secara resmi. Biden merespon dengan mengatakan bahwa perjanjian tersebut memang sudah tidak berlaku, namun ia tidak akan mengumumkannya secara resmi. Setelah beberapa pekan, belum ada tanggapan resmi dari pihak gedung putih terkait rekaman yang telah luas beredar di masyarakat tersebut (Magid, 2022).

Sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden telah menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berorientasi pada landasan "*The World's Beacon*". Penulis melihat adanya potensi perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi lebih diplomatis bila dibandingkan dengan era pemerintahan Trump yang mengadopsi landasan kebijakan luar negeri "*America First*". Dalam kaitannya dengan konflik program pengembangan nuklir

milik Iran sebagai salah satu ancaman stabilitas internasional, Biden telah mengutarakan rencana pemulihan JCPOA. Namun, sanksi ekonomi terhadap Iran tetap diberlakukan sebagai instrumen yang membatasi potensi program pengembangan nuklir Iran. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program nuklir Iran di era pemerintahan Joe Biden, terutama determinan-determinan yang memengaruhi langkah Joe Biden dalam menetapkan kontinuitas sanksi ekonomi terhadap Iran, meskipun telah mengutarakan upaya untuk memulihkan JCPOA.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pencetusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Joe Biden terkait program pengembangan nuklir Iran?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah dikemukakan pada rumusan masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran di era pemerintahan Presiden Joe Biden.
2. Memberikan suatu gambaran terkait proses pencetusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap program pengembangan nuklir Iran.

1.4 Cakupan Penelitian

Reformasi kepemimpinan dengan serta-merta membawa pergeseran kebijakan di dalam pemerintahan Amerika Serikat, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan mengenai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi lebih diplomatis dan berfokus pada penguatan kerja sama multilateral dengan landasan “*The World’s Beacon*” milik Joe Biden. Melalui orientasi kebijakan luar negeri tersebut, diharapkan dapat mengaktualkan posisi Amerika Serikat sebagai mercusuar bagi negara-negara berdaulat dalam menangani potensi ancaman internasional, salah satunya adalah eksistensi program nuklir Iran. Amerika Serikat telah mengupayakan berbagai agenda negosiasi bersama Iran, namun belum ada kesepakatan yang berhasil dicetuskan. Hingga pada Desember 2022, tersebar rekaman amatir berisi pernyataan Presiden Biden bahwa perjanjian JCPOA telah tidak berlaku. Di sisi lain, administrasi Biden juga memberlakukan penerapan sanksi ekonomi warisan pemerintahan Trump terhadap Iran. Untuk itu, fokus bahasan pada skripsi ini adalah determinan-determinan yang melatarbelakangi keputusan Joe Biden dalam memberlakukan kontinuitas sanksi ekonomi terhadap Iran. Ada pun rentang waktu penelitian dimulai sejak tahun 2021 yang merupakan tahun pertama Joe Biden resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, hingga tahun 2022.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dinamika hubungan Amerika Serikat dan Iran dalam kaitannya dengan program pengembangan nuklir secara konsisten mewarnai panggung internasional. Untuk itu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi salah

satu topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Para akademisi telah mengkaji dan menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir milik Iran melalui berbagai macam sudut pandang. Pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan mengambil beberapa literatur dengan bahasan serupa, yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan materi pendukung dalam penelitian ini.

Pada jurnal dengan judul “Strategi Amerika Serikat dalam Menekan Pengembangan Nuklir Iran” yang ditulis oleh Rio Sundari, terdapat pembahasan mengenai strategi Amerika Serikat untuk menghalau Iran dalam mengembangkan program nuklir. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat selama masa pemerintahan Presiden Trump merupakan bentuk dukungan keamanan bagi sekutunya, Israel. Amerika Serikat mencoba untuk memperkuat hegemoninya di kawasan Timur Tengah yang sarat akan potensi untuk pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat. Selain untuk mendapatkan akses sumber minyak, Amerika Serikat juga akan memiliki dukungan untuk menekan aktivitas penyebaran kelompok-kelompok ekstrimis di kawasan Timur Tengah. Sebagai salah satu donatur terbesar PBB, Amerika Serikat memiliki potensi besar dalam memengaruhi pola regulasi yang dikeluarkan oleh PBB. Hasilnya, PBB mengeluarkan beberapa resolusi terkait program pengembangan nuklir Iran yang memihak pencapaian kepentingan Amerika Serikat. (Sundari, 2020).

Pada sumber literatur selanjutnya, Katherine Thompson dan Oliver Thränert menganalisis faktor pendorong dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan luar negeri Trump yang berupa penarikan diri dari perjanjian nuklir Iran melalui tulisannya yang berjudul “*Trump Preparing to End Iran Nuke Deal*”.

Dalam sumber literatur tersebut digambarkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah peran Uni Eropa dalam meyakinkan Amerika Serikat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam perjanjian tersebut melalui pengagendaaan negosiasi. Namun, meskipun Uni Eropa telah menempuh upaya diplomatis untuk mempertahankan Amerika Serikat dalam keanggotaan JCPOA, Trump memilih untuk melanjutkan komitmennya keluar dari keanggotaan JCPOA yang dinilai merugikan Amerika Serikat dan justru menempatkan Iran pada posisi yang lebih menguntungkan (Thompson & Thränert, 2017).

Sumber literatur berikutnya ditulis oleh Ariane Tabatabai yang meneliti tentang implikasi kebijakan Iran terkait program pengembangan nuklir terhadap upaya non-proliferasi Amerika Serikat dengan judul “*Nuclear Decision-Making in Iran: Nonproliferation Efforts*”. Literatur ini menjelaskan kompleksitas dan keburaman proses pengambilan keputusan Iran menciptakan ketidakpastian prediksi arah dan reaksi Iran terhadap kebijakan yang berkaitan dengan program pengembangan nuklir. Namun, bila dilihat lebih dalam, terdapat peluang konsensi yang akan didapatkan oleh Amerika Serikat dengan membatasi komponen-komponen tertentu dalam program nuklir Iran. Meskipun Iran telah menetapkan kebutuhan akan program nuklir, penelitian, dan pengayaan terkait instrumen dalam pengembangan nuklir domestik (Tabatabai, 2020).

Terakhir, dalam jurnal yang berjudul “Resistensi Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat dan Iran: Studi Kasus Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”, Wildan Ilmanuarif Shafar dan Dian Mutmainah selaku penulis menjabarkan tentang faktor-faktor pendorong tercetusnya keputusan Amerika

untuk keluar dari JCPOA pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh determinan dari sumber individual, domestik, dan internasional. Eksistensi program pengembangan nuklir Iran dinilai sebagai ancaman bagi stabilitas regional Iran. Destabilisasi Iran sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi determinan dari sumber internasional. Kebijakan luar negeri Iran dinilai terlalu agresif, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang disepakati dalam JCPOA, ditambah dengan kapabilitas militer dan ekonomi Amerika Serikat yang kian mendominasi menjadi determinan pada sumber domestik. Sedangkan determinan pada sumber individual dipengaruhi oleh landasan kebijakan luar negeri “*America First*” milik Presiden Trump (Shafar & Mutmainah, 2020).

Meskipun dalam literatur-literatur di atas telah membahas mengenai proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran melalui berbagai sudut pandang, penelitian ini akan mencoba untuk mengeksplorasi proses perumusan kebijakan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran melalui kacamata *Decision Making Theory* milik William D. Coplin. Adapun fokus penelitian akan ditetapkan pada kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran yang dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden di tahun 2021 hingga tahun 2022. Penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi literatur-literatur di atas yang belum secara spesifik membahas mengenai proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden terkait program pengembangan nuklir Iran.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memahami fenomena analisis kebijakan luar negeri suatu negara diperlukan pemahaman dari berbagai sudut pandang. Efektivitas kebijakan luar negeri terletak pada kemampuan para pencetus kebijakan untuk mengkoordinasikan berbagai aspek diplomatis, ekonomi, keamanan dan pertahanan, politik, serta geografis dalam skala regional dan global. Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai serangkaian tindakan, rencana strategis, dan siasat yang digagas dengan tujuan menyelesaikan problematika dan mewujudkan transformasi di dalam suatu kawasan. Kebijakan luar negeri suatu negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi regional yang juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh situasi politik global. Selain itu, kebijakan luar negeri juga merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasional, sehingga aktor memiliki peranan penting dalam pencapaian kepentingan tersebut. Selama proses perumusan kebijakan luar negeri, para aktor terkait diberikan kewenangan untuk saling berkoordinasi merancang kebijakan dengan mempertimbangkan situasi regional dan internasional.

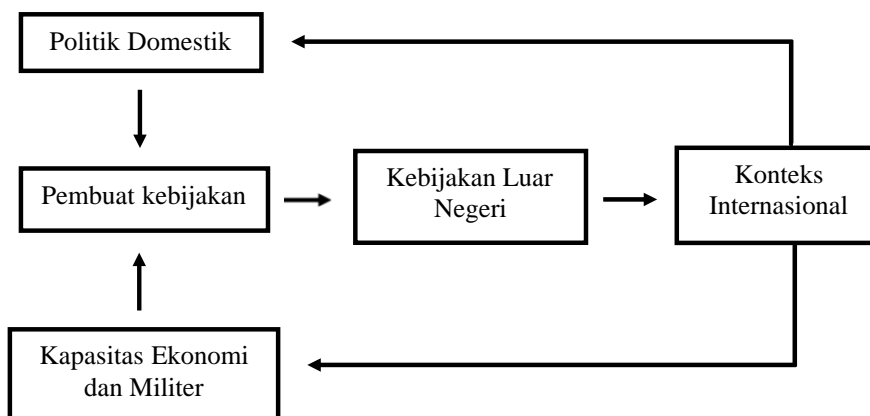
Berdasarkan *Decision Making Theory* milik William D. Coplin, perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tiga konsideran yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, yaitu situasi politik domestik, kapasitas ekonomi dan militer domestik, serta konteks internasional (Coplin & Marbun, 1992). Pada konsideran pertama, situasi politik domestik merupakan hubungan timbal balik yang terbentuk antara *decision maker* dan *policy influencers* yang meliputi *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Situasi politik domestik berperan penting dalam

Comment [2]: https://books.google.co.id/book/about/Negotiation_in_Social_Conflict.html?id=2vAAAAAAAJ&redir_esc=y

Comment [3]: bisa eksplor konsep Eskalasi Konflik (Pruitt), atau taktik negosiasi dalam konflik (Pruitt & Carnevale). Atau yang lain yang penting bisa menghighlight bahwa ada perbedaan yang awalnya pas kampanye mau memperbaiki hubungan tapi menjadi memburuk karena AS memberikan sanksi, Iran juga tidak taat dengan kesepakatan, d

Comment [4]: https://books.google.co.id/book/d=VigOAAAQAAJ&hl=id&source=gbs_similaroks

menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Selanjutnya pada konsideran kedua, penetapan kebijakan luar negeri harus memperhatikan kapasitas ekonomi dan militer domestik dengan mempertimbangkan pemenuhan terhadap kebutuhan aktivitas politik luar negeri. Kapasitas ekonomi dinilai berdasarkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Sedangkan untuk kapasitas militer domestik meliputi tingkat penggunaan kekuatan militer, kestabilan militer domestik, kebergantungan negara akan sumber dari luar negara. Yang terakhir, pada konsideran konteks internasional, dipengaruhi oleh faktor yang terjadi di luar wilayah dan kontrol negara. Hal ini meliputi faktor geografis, ekonomi, dan politis.



Gambar 1. *Decision Making Process Theory* oleh William D. Coplin

1.7 Argumen Sementara

Bila dilihat berdasarkan landasan kebijakan luar negeri Joe Biden yang berorientasi “*The World’s Beacon*”, Amerika Serikat akan lebih mengutamakan perbaikan kerja sama multilateral. Pemerintah Amerika Serikat di era Joe Biden

Comment [5]: ini perlu disesuaikan juga.

merumuskan kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan tiga konsideran, yaitu situasi politik domestik, kapasitas ekonomi dan militer domestik, serta konteks internasional. Berkaca dari kebijakan luar negeri Trump yang dinilai terlalu agresif dan tidak efektif menekan aktivitas pengembangan nuklir Iran, namun sebaliknya justru kian meningkatkan ketegangan dalam hubungan Amerika Serikat dan sekutu, Joe Biden akan menekankan pendekatan diplomatik sebagai instrumen resolusi konflik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan demikian, data-data yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari studi literatur yang membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran secara deskriptif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Amerika Serikat dan Iran pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Sedangkan instrumen-instrumen yang memengaruhi proses perumusan kebijakan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran di tahun 2021 hingga tahun 2022 merupakan objek yang akan diteliti menggunakan landasan teori *decision making* milik William D. Coplin.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang memuat bahasan mengenai instrumen yang memengaruhi proses perumusan kebijakan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran, yaitu berupa buku, jurnal, artikel media massa, serta kanal berita berkredibilitas agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

1.8.4 Proses Penelitian

Analisis data yang bersumber dari studi literatur akan diolah menggunakan metode kualitatif, sehingga data tersebut dapat disusun menjadi beberapa subtopik yang membahas masing-masing permasalahan secara lebih mendalam. Pembahasan pada tiap subtopik akan dianalisa kembali agar dapat dipergunakan sebagai jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh pembahasan yang bersifat sistematis, maka diperlukan deskripsi mengenai sistematika pembahasan. Pada Bab I Pendahuluan terdapat Latar Belakang Masalah yang menguraikan awal terciptanya hubungan kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran terkait pengembangan nuklir. Selanjutnya adalah Rumusan Masalah yang berisikan pertanyaan utama sekaligus penentu fokus penelitian ini. Selain itu juga terdapat Tujuan Penelitian yang mendeskripsikan manfaat dari penelitian ini. Cakupan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan ditujukan untuk membantu proses analisis data. Argumen Sementara memuat argumentasi penulis terkait pertanyaan penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Metode Penelitian berfungsi

untuk memberikan penjelasan mengenai Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Proses Penelitian. Pada Bab II, *Policy Influencers* pada Politik Luar Negeri Amerika Serikat terkait Kebijakan Program Nuklir Iran di Masa Pemerintahan Joe Biden, menjelaskan tentang pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, yaitu situasi politik domestik Amerika Serikat yang dipengaruhi pencetus kebijakan dan *policy influencers: bureaucratic influencer, partisan influencer, interest influencer, dan mass influencer*. Selanjutnya, pada Bab III Kapasitas Ekonomi dan Militer serta Konteks Internasional dalam Pemerintahan Joe Biden terkait Program Nuklir Iran, memaparkan mengenai determinan Situasi Politik Domestik, Kapasitas Ekonomi dan Militer Domestik, dan Konteks Internasional yang dicetuskan oleh Coplin dalam konteks perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran di era pemerintahan Joe Biden. Yang terakhir, pada bab IV memuat kesimpulan dan rekomendasi dari penulis.

BAB II

POLICY INFLUENCERS PADA POLITIK AMERIKA SERIKAT

TERKAIT KEBIJAKAN PROGRAM NUKLIR IRAN PADA MASA

PEMERINTAHAN JOE BIDEN

Coplin menjelaskan bahwa situasi politik domestik dapat memengaruhi alur pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara melalui dukungan atau tuntutan yang menciptakan kondisi politik domestik dengan karakteristik tertentu. Hal tersebut kemudian turut memengaruhi dan menjadi pertimbangan para pencetus kebijakan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian masalah rasional yang melibatkan para pengambil keputusan dalam memperhitungkan segala tujuan dan alternatif kebijakan yang tersedia, untuk kemudian menetapkan suatu kebijakan yang dinilai paling tepat. Sedangkan pengambil keputusan didefinisikan sebagai aktor-aktor yang terlibat secara langsung, bersinggungan, dan memengaruhi determinan dalam situasi politik domestik (Coplin & Marbun, 1992).

Dalam *Decision-Making Process Theory*, Coplin menjelaskan lebih lanjut tentang determinan yang mempengaruhi situasi politik domestik sebagai salah satu konsideran pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Karakteristik politik luar negeri ditentukan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi dan stabilitas politik domestik. Dalam hal ini, para perumus kebijakan mempunyai peranan penting sebagai aktor yang berwenang dalam proses legitimasi kebijakan luar negeri. Evaluasi strategi, rumusan kebijakan, dan arah kepentingan nasional nantinya akan ditentukan oleh aktor-aktor perumus kebijakan. Seluruh determinan saling memiliki keterkaitan sehingga memengaruhi satu sama lain dan

Comment [T-6]: Policy Influencers pada Polit Amerika Serikat terkait Kebijakan Program Nukli Iran pada Masa Pemerintahan Biden

Comment [T-7]: buat 1 halaman saja, 2-3 paragraf yang menjelaskan bab 2 ini terdiri dari subbab apa aja

menciptakan hubungan timbal balik antara para pencetus kebijakan dalam negeri dan aktor-aktor yang memengaruhi politik luar negeri. Coplin menggambarkan fenomena ini dengan istilah *policy influencers*, yang meliputi *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin & Marbun, 1992). Untuk itu, pada bab ini akan membahas mengenai situasi politik domestik Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh *policy influencers: bureaucratic influencer, partisan influencer, interest influencer, dan mass influencer* dalam pencetusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Ira pada era pemerintahan Presiden Joe Biden di tahun 2021 hingga tahun 2022.

2.1 Bureaucratic Influencer

Pada proses perumusan kebijakan, terdapat aktor-aktor yang menuangkan kepentingan pribadinya ke dalam kepentingan nasional untuk dipertimbangkan dalam rumusan kebijakan luar negeri. *Bureaucratic influencer* digunakan Coplin untuk merujuk individu, kelompok, maupun organisasi- organisasi berskala luas yang menjadi bagian dalam hierarki eksekutif pada lembaga pemerintahan yang terlibat secara langsung dan memengaruhi proses perumusan kebijakan. Kelompok birokratis memiliki peranan substansial dalam penetapan suatu kebijakan luar negeri dengan kepemilikan akses langsung kepada perumus kebijakan. Adanya pertukaran informasi dan bantuan politik yang diberikan kelompok birokratis kepada perumus kebijakan, menciptakan jalan bagi kelompok birokratif untuk mengubah kebijakan-kebijakan di tingkat administratif (Coplin & Marbun, 1992).

Comment [T-8]: kebijakannya harus disebut secara eksplisit

Sesuai dengan klasifikasi yang telah dijabarkan oleh Coplin, presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan otoritas eksekutif yang berwenang merumuskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran pada era pemerintahan Joe Biden merupakan *bureaucratic influencer*. Pada Januari 2021, Joe Biden resmi kembali ke Gedung Putih dan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Selama masa kampanye, Biden kerap mengatakan akan mengembalikan citra dan peran Amerika Serikat dalam politik internasional yang dinilai telah “rusak” selama masa kepemimpinan Donald Trump. Citra memegang peranan penting dalam politik internasional sebagai salah satu indikator rasional yang mendasar dalam penetapan kebijakan luar negeri bagi suatu negara. Substansi yang bertentangan dengan citra suatu negara dapat menjadi ancaman bagi integritas negara, keamanan citra, dan indeks dukungan politisi terhadap suatu kebijakan (Coplin & Marbun, 1992).

Biden melihat adanya urgensi untuk mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama kebijakan terkait program pengembangan nuklir milik Iran. Salah satu upaya dalam mewujudkan landasan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, “*The World’s Beacon*”, dengan menetapkan langkah untuk mengadopsi strategi peningkatan keterlibatan diplomatik Amerika Serikat pada kerja sama internasional. Namun, Biden menilai bahwa Iran akan menggunakan strategi tekanan maksimal demi memperoleh konsensi dari negara-negara Barat, untuk itu Biden memutuskan kontinuitas sanksi ekonomi terhadap Iran. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan ambisi Iran dalam pengembangan teknologi nuklir dan menghidupkan kembali kesepakatan yang membatasi aktivitas pengembangan nuklir Iran (Tharoor, 2022). Pada 15 Januari 2021, *Secretary of*

State, Michael R. Pompeo mengumumkan perluasan cakupan sanksi terkait pengelolaan logam Iran oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Setiap transaksi 15 material logam yang meliputi aluminium 6061-T6, aluminium 6061-O, aluminium 6063-T5, aluminium 7075-O, aluminium 6061-F, aluminium 6063-T1, aluminium 7075-T6, AISI 316L, AISI 309, AISI 304, 100Cr6, 115CrV3, BAJA 4340”, ZrSiO₂ (pasir zirkon, silikat zirkonium), dan zirconium carbide termasuk logam mentah maupun setengah jadi, ke atau dari Iran yang digunakan untuk program pengembangan nuklir, militer, dan rudal balistik Iran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan dan Kontrateror Proliferasi Iran Bagian 1245 (State, U.S. Department of, 2021).

Meskipun begitu, Biden tetap berupaya untuk mewujudkan komitmennya dalam menghidupkan kembali perjanjian nuklir multilateral yang telah ditinggalkan Donald Trump pada tahun 2018 silam. Berkaca dari kebijakan era pemerintahan Trump, Biden menawarkan sejumlah resolusi konflik melalui jalur diplomatik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran. Belum genap satu bulan masa jabatan, pada 28 Januari 2021, Administrasi Biden menugaskan Robert Malley sebagai Utusan Khusus bagi Iran. Meskipun pada akhirnya Iran menunjukkan konsistensinya dengan menolak perundingan secara langsung bersama Amerika Serikat sebelum tercetus kesepakatan pengurangan sanksi (Humud & Thomas, 2023, p. 13).

Hingga tahun 2022, Administrasi Biden belum memberlakukan otoritas sanksi baru terhadap Iran. Sementara itu, tensi antara Amerika Serikat dan Iran pun tak kunjung meredam. Otoritas Amerika Serikat menerapkan kontinuitas sanksi terhadap Iran sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku dan juga

didasarkan pada keputusan presiden Joe Biden, dan diikuti dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas militer guna melindungi kepentingan di kawasan Timur Tengah. Selama Joe Biden menjabat sebagai presiden Amerika sejak tahun 2021 hingga 2022, dilaporkan bahwa pasukan bersenjata Amerika Serikat telah melakukan operasi militer terhadap target yang berhubungan dengan Iran melebihi 80 kali.

Pasukan bersenjata Amerika Serikat melancarkan serangan balasan dari organisasi yang memberikan dukungan kepada Iran pada Juni 2021 di Iraq, pada Februari dan Juni 2021, serta Januari dan Agustus 2022 di Suriah. Selain itu, pasukan angkatan laut Amerika Serikat juga turut serta mencegah distribusi persenjataan yang berasal dari Iran. Tak hanya itu, Amerika Serikat turut membangun komitmen bersama Israel dalam mengembangkan aliansi militer sebagai mekanisme pertahanan. Amerika Serikat dan Iran sepakat menetapkan persoalan Iran pada level permasalahan global. Sama seperti Amerika Serikat, dengan diberhentikannya JCPOA sebagai kesepakatan global yang membatasi program nuklir Iran, Israel turut menaruh kekhawatiran besar terhadap perkembangan program nuklir di Teheran (Nissenbaum, Dion; Wall Street Journal, 2023).

Sampai penghujung tahun 2022, belum ada titik terang terkait konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini mengisyaratkan ketidakmampuan Biden untuk memenuhi janji menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran pada 2 tahun masa kepemimpinannya. Hingga akhirnya Biden memutuskan untuk memaksimalkan seluruh elemen dalam pemerintahan untuk menekan aktivitas nuklir Iran. Berdasarkan penjelasan di atas, Joe Biden sebagai kepala

Comment [T-9]: buat 1 halaman saja, 2-3 paragraf yang menjelaskan bab 2 ini terdiri dari subbab apa aja.

pemerintahan dan kepala negara beserta individu dan organisasi pada lembaga-lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, seperti lembaga administrasi, Departemen Luar Negeri, Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Iran, dan Senator Amerika Serikat, berperan sebagai *bureaucratic influencers* pada perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran. Coplin menggunakan istilah *bureaucratic influencers* untuk merujuk individu, kelompok, maupun organisasi-organisasi yang berada pada hierarki eksekutif dalam pemerintah yang berhubungan langsung dengan segala proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara (Coplin & Marbun, 1992).

2.2 **Partisan Influencer**

Coplin mendefinisikan *partisan influencer* atau partai yang memengaruhi sebagai media penghubung tuntutan-tuntutan masyarakat yang menyangkut kebijakan-kebijakan kepada aktor dalam pemerintahan, untuk kemudian diterjemahkan menjadi suatu tuntutan politis. Situasi politik domestik yang nyata dihadapi oleh masyarakat di lapangan akan disampaikan kepada kelompok-kelompok politis agar dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Menurut Coplin, *partisan influencers* cenderung menempatkan fokusnya pada persoalan pembentukan kebijakan domestik, namun tak jarang juga terlibat dalam proses pencetusan kebijakan luar negeri, terutama bila kebijakan kritis yang mampu memengaruhi situasi politik domestik. Partai memegang peranan krusial sebagai fasilitator kelompok-kelompok politisi untuk menduduki kursi pemerintahan. Pada sistem politik terbuka, *partisan influencer* menjadi aliansi pemerintahan dengan adanya pemilihan umum. Sedangkan pengaruh *partisan*

Comment [T-10]: ini langsung jadi 2.1

influencer pada pemerintahan dengan sistem politik tertutup tidak terlalu signifikan. Dengan kata lain, partai dimanfaatkan sebagai tunggangan politik dalam sistem politik terbuka seperti demokrasi. Kerap kali aktor perumus kebijakan menjadi perpanjangan tangan untuk mengedepankan kepentingan partai politik tersebut dalam perumusan kebijakan (Coplin & Marbun, 1992).

Isu pemulihan di era pemerintahan Biden memicu tanggapan berbeda dari kongres. Anggota kongres bahkan menandatangani enam pakta terkait strategi diplomasi untuk Iran. Sebagian mendesak Biden untuk memperkuat sanksi dan tekanan ekonomi kepada Iran, lainnya mendorong implementasi penuh JCPOA. Beberapa bulan sejak Joe Biden resmi kembali ke gedung putih, skeptisisme partisan Biden di Capitol Hill terhadap upaya untuk bergabung kembali dalam perjanjian nuklir multilateral kian meningkat. Senator asal Partai Demokrat, Ben Cardin menghadiri konferensi press yang membahas kesepakatan nuklir Iran pada 21 Maret 2022. Ia mengatakan negosiasi masih belum selesai dan kesepakatan belum dicapai. Ben Cardin sendiri menentang langkah Biden untuk menghidupkan perjanjian nuklir bersama Iran.

Pada 23 Maret 2022, anggota parlemen dari partai demokrat menyatakan keberatan dengan upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir. Lima perwakilan Demokrat menyampaikan pakta tersebut secara terbuka, sementara 13 anggota dewan lainnya memberikan ringkasan alasan penolakan dengan menyebutkan kekhawatiran partisan Partai Demokrat sebagian besar terfokus pada tuntutan Iran yang menginginkan perjanjian dihidupkan kembali tanpa modifikasi. Hal ini dinilai dapat menyebabkan ruang lingkup perjanjian tak terbatas yang memberikan kesempatan bagi perluasan operasi *Islamic Revolutionary Guard*

Comment [T-11]: harus eksplisit bagaimana Partai Demokrat mempengaruhi sebagai "aliansi pemerintahan" dan yang dimintai pertimbangan. Coplin-nya dikutip lagi.

Corps (IRGC), dukungan proksi di seluruh wilayah, dan juga peningkatan aktivitas rudal balistik Iran. Meski belum ada yang dapat memastikan kapan kesepakatan nuklir tersebut dapat tercapai, partisan dari Partai Demokrat meminta peninjauan ulang terkait kesepakatan nuklir Iran yang dinilai memperdagangkan keringanan sanksi terhadap aktivitas pengembangan nuklir Iran (Desiderio, Dems Start Questioning Biden Admin's Iran Nuclear Talks, 2022).

Bila menelik kembali awal perumusan JCPOA pada masa pemerintahan Obama, mayoritas legislator menolak kebijakan tersebut. Perselisihan sengit antara golongan pendukung dan penentang di Capitol Hill tidak menghalangi jalan Obama untuk meneruskan implementasi JCPOA bersama sejumlah kontroversi di belakangnya. Obama memilih langkah maju dengan mempertimbangkan sejumlah keuntungan yang akan diperoleh bila meratifikasi perjanjian tersebut. Begitu pula respon yang diterima Biden terhadap upayanya untuk memulihkan perjanjian nuklir Iran. Republikan secara seragam menentang keputusan Biden, dan sebagian Demokrat telah menyatakan keraguan akan keberlanjutan JCPOA. Namun, Senator Chris Murphy (D-Conn) sebagai salah satu pendukung administrasi Biden di Capitol Hill, memiliki prediksi bahwa akhirnya seluruh senator dari partai Demokrat akan menyetujui langkah pemulihan JCPOA sebagai kebijakan yang menghalangi Iran mencapai senjata nuklir (Desiderio, 2022).

Upaya Biden juga mendapat penolakan serupa dari senator partai Republik. Berdasarkan laporan Komite Luar Negeri Amerika Serikat pada 14 Maret 2022, 49 anggota senator dari Partai Republik menyampaikan penolakannya terhadap negosiasi pemulihan JCPOA yang digagas oleh Biden. Perjanjian tersebut dinilai hanya akan meringankan sanksi dengan imbalan

pembatasan aktivitas pengembangan nuklir sementara. Sebaliknya akan mendorong pelemahan pengaruh Amerika Serikat dengan mempererat hubungan diplomatik antara Iran bersama Moskow dan Beijing pada sektor keamanan dan keuangan. Partai Republik sepakat akan mendukung kebijakan-kebijakan yang menghalangi program pengembangan nuklir Iran, membatasi program rudal balistik, dan menghalangi dukungan Iran terhadap terorisme dengan mendesak Senator untuk memberikan suara pada setiap upaya administrasi yang diadakan (Foreign Relations Committee, 2022).

Para senator yang menandatangani penolakan terhadap upaya pemulihan JCPOA adalah Sen. Jim Risch (R-Idaho), Sen. Jim Inhofe (R-Okla.), Sen. Mitch McConnell (R-Ky.), Sen. John Thune (R-S.D.), Sen. John Barrasso (R-Wyo.), Sen. Roy Blunt (R-Mo.), Sen. Joni Ernst (R-Iowa), Sen. Rick Scott (R-Fla.), Sen. Marco Rubio (R-Fla.), Sen. Pat Toomey (R-Pa.), Sen. Rob Portman (R-Ohio), Sen. Mike Crapo (R-Idaho), Sen. Marsha Blackburn (R-Tenn.), Sen. John Boozman (R-Ark.), Sen. Mike Braun (R-Ind.), Sen. Richard Burr (R-N.C.), Sen. Shelley Moore Capito (R-W.Va.), Sen. Tommy Tuberville (R-Ala.), Sen. Bill Cassidy (R-La.), Sen. John Cornyn (R-Texas), Sen. Tom Cotton (R-Ark.), Sen. Thom Tillis (R-N.C.), Sen. Ted Cruz (R-Texas), Sen. Todd Young (R-Ind.), Sen. Steve Daines (R-Mont.), Sen. Deb Fischer (R-Neb.), Sen. Lindsey Graham (R-S.C.), Sen. Chuck Grassley (R-Iowa), Sen. Dan Sullivan (R-Alaska), Sen. Bill Hagerty (R-Tenn.), Sen. Josh Hawley (R-Mo.), Sen. John Hoeven (R-N.D.), Sen. Cindy Hyde-Smith (R-Miss.), Sen. Ron Johnson (R-Wis.), Sen. John Kennedy (R-La.), Sen. James Lankford (R-Okla.), Sen. Mike Lee (R-Utah), Sen. Cynthia Lummis (R-Wyo.), Sen. Roger Marshall (R-Kan.), Sen. Jerry Moran (R-Kan.),

Sen. Lisa Murkowski (R-Alaska), Sen. Mitt Romney (R-Utah), Sen. Mike Rounds (R-S.D.), Sen. Ben Sasse (R-Neb.), Sen. Tim Scott (R-S.C.), Sen. Richard Shelby (R-Ala.), Sen. Kevin Cramer (R-N.D.), Sen. Susan Collins (R-Maine), dan Sen. Roger Wicker (R-Miss.) (Foreign Relations Committee, 2022).

Menurut Coplin, *partisan influencers* pada hampir seluruh negara demokrasi memainkan peran terbatas dalam menyetujui atau menolak suatu tindakan politik luar negeri yang dicetuskan oleh pengambil kebijakan akibat kompleksitas isu luar negeri. Meskipun begitu, pengambil keputusan juga memerlukan dukungan dan suara dari *partisan influencers* sebagai upaya pengumpulan dukungan atas keputusan-keputusan politik luar negeri yang akan dicetuskan. *Partisan influencers* berperan mengelompokkan kepentingan dari *bureaucratic influencers* dan *interest influencers* (Coplin & Marbun, 1992). Bila dilihat dalam kasus ini, Joe Biden sebagai pengambil keputusan mencoba untuk mempertimbangkan keputusan dari partisan partai demokrat dan partai republik yang merupakan *partisan influencers*.

2.3 *Interest Influencer*

Interest influencer atau kepentingan yang memengaruhi merupakan individu-individu yang tergolong ke dalam suatu kelompok yang sama berdasarkan tujuan dan kepentingannya, sehingga memberikan pengaruh dalam aktivitas pemerintahan dan cenderung dimanfaatkan sebagai sumber dukungan oleh kelompok politisi. Pada sistem politik terbuka, *interest influencer* mempunyai peranan dan pengaruh yang cukup besar dalam proses perumusan kebijakan melalui dukungan publik dan juga kemampuan finansial untuk memengaruhi *partisan influencer* beserta aktor-aktor pencetus kebijakan. Isu-isu

Comment [T-12]: interest influencer juga sam harus dikutip dan dijelaskan penjelasan Coplin di awal, terus disertai dengan bukti-bukti yang terjad pada masa Biden, dan di akhir disimpulkan lagi dengan mengutip lagi Coplin.

politik di suatu negara justru mendukung kecenderungan organisasi-organisasi untuk berkembang. Sedangkan pada sistem politik tertutup, *interest influencer* berorganisir bersama *bureaucratic influencer* dan *partisan influencer* secara tertutup dengan menekan kebijakan-kebijakan luar negeri dengan kategori sekunder. Kebijakan-kebijakan yang terbatas membatasi divergensi kepentingan pada negara yang menganut sistem satu partai. Namun, terkadang kepentingan yang beragam tersebut mampu melintasi garis-garis organisasional (Coplin & Marbun, 1992).

The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) merupakan kelompok lobi yang bertujuan untuk menjaga hubungan bilateral Amerika Serikat dan Israel, serta mendorong eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah dengan memanfaatkan kekuatan politik Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). AIPAC merupakan salah satu kelompok lobi yang berpengaruh kuat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke negara di kawasan Timur Tengah. Juru bicara AIPAC, Marshall Wittmann menentang rencana Biden untuk kembali ke dalam kesepakatan nuklir tanpa adanya penyelesaian diplomatik yang berkelanjutan. Wittmann mendorong Biden untuk meninjau kembali perjanjian nuklir yang dinilai melonggarkan sanksi dan membiarkan pendanaan miliaran dolar masuk ke proyek pengembangan nuklir milik Iran. AIPAC terus menyuarakan kepada Kongres dan Administrasi Biden untuk meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada Iran, mengingat sanksi ekonomi tidak ditegakkan sepenuhnya. Menurut AIPAC, Iran mencoba mencari konsensi dan mengulur waktu, sementara terus mengoptimalkan pengembangan proyek nuklir (Samuels, 2021).

Selanjutnya, *National Iranian American Council* (NIAC) merupakan organisasi non-pemerintah bagi diaspora Iran di Amerika yang berpusat di Washington D.C. Terkait dengan pemulihan kembali JCPOA, berdasarkan laporan yang dikeluarkan NIAC pada 15 Oktober 2022, NIAC bersama komunitas Iran-Amerika mendukung rencana peratifikasian kembali JCPOA. Semua dukungan didasarkan atas keinginan untuk mengakhiri sanksi yang berpotensi merugikan masyarakat sipil Iran, merusak gerakan hak asasi manusia dan demokrasi. Namun, saat ini negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran telah terhenti untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, NIAC sepenuhnya mendukung pandangan administrasi Biden untuk memprioritaskan aksi protes dan peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. NIAC menentang kepemilikan senjata nuklir Iran dengan pertimbangan potensi konflik dan stabilitas kawasan yang dapat ditimbulkan (National Iranian American Council, 2022). Dalam sebuah email kepada media VOA, Ryan Costello selaku Direktur Kebijakan NIAC menyampaikan harapannya pada langkah-langkah produktif dari legislator Amerika Serikat untuk mengatasi tindakan agresif pemerintahan Iran (Lipin, Yazdian, & Bakhtiar, 2022). Bila disimpulkan, NIAC berpegang pada pandangan bahwa mencegah eksistensi senjata nuklir milik Iran merupakan langkah krusial untuk menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.

Interest influencers mempunyai peranan penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri dengan memengaruhi kompleksitas proses politik domestik. Menurut Coplin, *interest influencers* menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan dukungan terhadap kepentingan mereka, seperti kampanye, menawarkan sokongan finansial, menghubungi pengambilan kebijakan,

bureaucratic influencer, dan *partisan influencer*, atau bahkan melalui ancaman (Coplin & Marbun, 1992). Hal ini selaras dengan tindakan AIPAC dan NIAC sebagai kelompok lobi yang memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat agar mempertimbangkan kepentingan Israel dan diaspora Iran-Amerika dalam mencetuskan kebijakan terhadap program pengembangan nuklir Iran.

2.4 **Mass Influencer**

Mass Influencer atau massa yang memengaruhi dijelaskan Coplin sebagai opini atau pandangan yang dimiliki individu atau kelompok yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan saat merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Opini publik kerap dijadikan alat oleh para pengambil keputusan dan juga *policy influencers* agar masyarakat merasionalisasi instrumen-instrumen politik luar negeri. Implikasi pandangan *mass influencers* terhadap para pencetus kebijakan luar negeri sangat beragam, sesuai dengan sistem politik yang diterapkan pada negara tersebut. Pada sistem politik tertutup, para pengambil keputusan berupaya mengontrol opini publik melalui partai koalisi rezim dan siaran media massa, seperti radio, surat kabar, dan televisi. Sehingga masyarakat di negara dengan sistem politik tertutup cenderung akan mendukung agenda-agenda politik luar negeri negaranya. Sedangkan pada sistem politik terbuka, opini publik cenderung terbebas dari manipulasi para pengambil kebijakan. Meskipun, pada sistem politik terbuka masyarakat dapat leluasa memperoleh informasi yang berhubungan dengan kondisi pemerintahan domestik, masyarakat cenderung jarang menyarikan dan mengambil informasi yang terlihat di permukaan, terlebih untuk isu-isu dengan cakupan luas (Coplin & Marbun, 1992).

Comment [T-13]: cari bukti bahwa memang penolakan dari masyarakat, misal ada anggota kongres yang mewakili konstituen, atau ada pemberitaan demo civil movement menentang ICPOA, dsb.

Tuntutan publik tidak selalu dapat tersampaikan kepada para pemangku kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mencetuskan kebijakan. Terlebih bila publik tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Maka dari itu, dewan perwakilan rakyat dan media massa memegang peranan krusial, terutama di era digital seperti sekarang ini. Perwakilan rakyat berwenang menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah eksekutif, sedangkan media massa berperan menyuarakan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah.

Pada awal masa jabatan, Biden optimis terhadap upaya pemerintah Amerika Serikat untuk memulihkan JCPOA. Namun, di pertengahan tahun 2021, Ebrahim Raisi yang merupakan mantan kepala yudisial yang dinilai ultrakonservatif terpilih sebagai Presiden baru Iran. Dilansir dari *The New York Times*, pada bulan Juni 2021, administrasi Biden begitu yakin bahwa agenda negosiasi putaran selanjutnya akan segera dilaksanakan, sehingga salah satu negosiator Amerika Serikat meninggalkan barang bawaannya di hotel di kota Wina, tempat negosiasi berlangsung empat bulan terakhir. Namun, negosiasi putaran selanjutnya tidak pernah terjadi. Sementara, tim inspeksi dilarang untuk menganalisa beberapa fasilitas di pabrik Natanz, dan kesepakatan untuk menjaga kamera dan sensor di pabrik pengembangan nuklir Iran berakhir pada bulan Juni. Sehingga, tim inspeksi internasional kesulitan untuk mengukur tingkat pengayaan dan jumlah bahan baku yang telah diproduksi untuk pengembangan nuklir. Sebaliknya, Iran justru kian meningkatkan aktivitas pengayaan uranium. Robert Malley mengungkapkan Iran kembali menuntut keringanan sanksi yang tidak realistis. Penolakan Iran pada negosiasi putaran enam, mengakibatkan upaya

Comment [T-14]: cari contoh yang lebih konkret membuktikan adanya pendapat yang menolak keputusan Biden untuk melanjutkan JCPOA.

negosiasi administrasi Biden berakhir sebagai “kesepakatan yang hampir lengkap”. Kebijakan-kebijakan Iran di bawah kepemimpinan Ebrahim Raisi memperkecil peluang untuk mengembalikan kesepakatan nuklir (Sanger, Jakes, & Fassihi, 2021)

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 15 Juli hingga 1 Agustus 2022 oleh *The Chicago Council on Global Affairs*, mayoritas masyarakat Amerika Serikat mendukung rencana pemulihan JCPOA (59%), dengan sebagian besar suara diperoleh dari pendukung partai demokrat. Sedangkan sebanyak (36%) menyetujui pendapat bahwa Amerika Serikat tidak perlu melanjutkan keanggotaan JCPOA dan meneruskan sanksi ekonomi, meski hal ini berarti memberikan jalan bagi Iran untuk membangun teknologi senjata nuklir. Jika Teheran mengambil langkah untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir, mayoritas masyarakat Amerika Serikat menentang keputusan tersebut (74%), sebaliknya hanya (23%) yang menyetujui pengembangan teknologi senjata nuklir Iran. Sebagai gantinya, mayoritas masyarakat mendukung peningkatan sanksi ekonomi dan diplomatik (79%), serta sebanyak (64%) mendukung langkah untuk melancarkan serangan siber. Meskipun masyarakat Amerika Serikat cenderung menolak penggunaan kekuatan militer, sebagian suara minoritas mendukung penyerangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran (46%), dan sebanyak (38%) menyetujui penggunaan pasukan militer darat Amerika Serikat untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran (Smeltz & Sullivan, 2022).

Bila ditarik kesimpulan melalui hasil jajak pendapat yang dilakukan *The Chicago Council on Global Affairs*, mayoritas masyarakat Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap rencana pemulihan JCPOA yang digagas pada

masa pemerintahan Biden, namun sebagian besar masyarakat Amerika Serikat juga menolak eksistensi pengembangan teknologi nuklir milik Iran. Selain itu, kepemimpinan Ebrahim Raisi yang dinilai ultrakonservatif menghalangi proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Hal ini menjadi pertimbangan dalam rencana ratifikasi ulang perjanjian JCPOA, sebab Iran dinilai belum mematuhi regulasi nuklir yang telah ditetapkan bersama. Potensi pengembangan senjata nuklir milik Iran menjadi salah satu alasan utama negosiasi antara Amerika dan Iran belum mencapai kesepakatan yang diharapkan hingga akhir tahun 2022.

Secara keseluruhan, protes dan kontroversi terhadap langkah Biden untuk kembali terlibat dalam JCPOA mencerminkan keragaman opini publik di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Efek dari opini yang terbentuk di kalangan publik serta dampak yang ditimbulkan pada proses perumusan kebijakan luar negeri dapat dianalisa melalui karakteristik masing-masing sistem politik. Kendati publik tidak mendiktekan arus politik luar negeri, *mass influencers* mendapatkan peranan penting sebagai pencipta persepsi bagi pengambil keputusan. Menurut Coplin, pada negara dengan sistem politik terbuka seperti Amerika Serikat, **opini publik** merupakan sumber informasi yang konstan. Para pengambil keputusan memerlukan informasi tentang pandangan publik terhadap status para pengambil keputusan, terutama merumuskan kebijakan-kebijakan dengan mempertimbangkan efeknya terhadap opini yang akan dikeluarkan oleh publik (Coplin & Marbun, 1992).

Pada bab ini telah membahas *policy influencers* yang dijelaskan oleh William D. Coplin sebagai salah satu determinan yang memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Joe Biden terkait dengan

Comment [K15]: perlu ada tambahan dari apa yang dimuat media (misal CNN, NYT, atau WaP) menerbitkan artikel yang menentang JCPOA, siapa yang menulis? ini bisa jadi bagian dari opini publi

program pengembangan nuklir Iran. *Policy influencers* meliputi *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Untuk itu, pada bab selanjutnya akan menganalisa determinan kondisi militer dan ekonomi domestik serta konteks internasional yang melatarbelakangi keputusan Joe Biden untuk meneruskan sanksi terhadap Iran, meski berupaya untuk mewujudkan negosiasi pemulihan JCPOA.

BAB III

**KAPASITAS EKONOMI DAN MILITER SERTA KONTEKS
INTERNASIONAL DALAM PEMERINTAHAN JOE BIDEN TERKAIT
PROGRAM NUKLIR IRAN**

Agar terciptanya suatu gagasan kebijakan luar negeri yang dapat mewujudkan kepentingan nasional, di samping peranan para *policy influencers*, juga diperlukan pemahaman substansial dalam mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan militer domestik. Hal ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan pada sektor ekonomi dan militer domestik yang menjadi hambatan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional. Selanjutnya, konteks internasional juga turut memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri. Analisa konteks internasional didasarkan pada kalkulasi interaksi antar negara dan karakteristik sistem internasional yang membentuk preferensi, prioritas, dan tindakan negara dalam hubungan diplomatik. Untuk itu, pada bab ini akan membahas mengenai konsideran kapasitas ekonomi dan militer serta konteks internasional, agar dapat memberikan gambaran terkait proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era pemerintahan Joe Biden di tahun 2021 hingga tahun 2022.

3.1 Kapasitas Ekonomi dan Militer Domestik

Perumusan kebijakan luar negeri melewati berbagai proses pelik dan pertimbangan panjang terkait situasi regional, tak terkecuali persoalan pada sektor ekonomi dan militer. Menurut Coplin, sektor ekonomi dan sektor militer memiliki kaitan kompleks yang bersifat dinamis dengan adanya pengaruh dari perkembangan teknologi dan kondisi sosial. Pada periode feodal dan awal periode

Comment [T-16]: interest influencer juga sam harus dikutip dan dijelaskan penjelasan Coplin di awal, terus disertai dengan bukti-bukti yang terjadi pada masa Biden, dan di akhir disimpulkan lagi dengan mengutip lagi Coplin.

pascafeodal, pertumbuhan kekuatan militer disokong oleh ekonomi pertanian, dan pada periode klasik, pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan militer adalah manufaktur emas. Sedangkan pada periode modern, industrialisasi menjadi sumber utama dalam perkembangan ekonomi dan militer. Apabila kapasitas militer mengalami peningkatan, dampaknya akan meluas pada pertumbuhan sektor ekonomi. Stabilitas militer dan pertahanan mendorong investasi, inovasi industri, serta laju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, peningkatan kapasitas ekonomi memberikan modal bagi anggaran di sektor militer dan pertahanan yang mendorong investasi teknologi militer, pelatihan personel militer, modernisasi peralatan, infrastruktur pertahanan strategis, dan pembiayaan proyek-proyek militer jangka panjang (Coplin & Marbun, 1992).

Untuk melihat sejauh mana kapasitas ekonomi memengaruhi pola kebijakan luar negeri suatu negara, Coplin menggambarkan hubungan antara kemampuan produksi barang dan jasa serta tingkat ketergantungan negara terhadap perdagangan dan finansial internasional sebagai indikator dalam menganalisa kapasitas ekonomi negara. Keragaman latar belakang geografis, historis, dan budaya masing-masing negara mendorong perbedaan kapasitas produksi barang dan jasa. Negara terbelakang dengan aktivitas ekonomi yang rendah cenderung menghasilkan produksi barang dan jasa terbatas, umumnya berpusat pada produk-produk pertanian dan bahan mentah. Namun, sejumlah negara dengan ekonomi mumpuni juga menghadapi problematika keterbatasan dalam produksi barang dan jasa, seperti Inggris yang mengalami dependensi produksi komoditas pertanian dan bahan mentah. Meskipun begitu, negara-negara

Comment [K17]: dijelaskan dulu definisi ekonomi menurut coplin (barang dan jasa) dan militer (geografis, ekonomis, politis).

tersebut memiliki keistimewaan dalam mendapatkan stabilitas pasar internasional untuk memasarkan komoditas unggulan negaranya. Selanjutnya, Coplin menjelaskan pada tingkat ketergantungan negara terhadap perdagangan dan finansial internasional, umumnya neraca pembayaran menjadi tolak ukur dalam membandingkan karakteristik ekonomi internasional suatu negara. Seluruh transaksi internasional, termasuk penjualan dan pembelian dari dan ke luar negeri, pengeluaran untuk sektor militer di negara lain, investasi asing, dan penerimaan serta pengeluaran lainnya yang membentuk neraca pembayaran (Coplin & Marbun, 1992).

Di awal masa jabatan, Biden dihadapkan pada isu pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan mendorong terjadinya inflasi global. Berdasarkan "*the Biden-Harris Economic Blueprint*" yang dikeluarkan oleh *the White House Government*, penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan ratusan ribu bisnis terpaksa tutup pintu dan hilangnya jutaan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu, situasi ekonomi Amerika Serikat semakin diperburuk dengan warisan ancaman eksistensial perubahan iklim, persoalan ekonomi keluarga kelas menengah dan pekerja, kegagalan infrastruktur, penurunan sektor manufaktur, serta disparitas rasial yang persisten (The White House, 2022).

Pemerintah Biden menetapkan pemulihan ekonomi regional sebagai prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai angka 5,7%. Peningkatan tersebut merupakan laju tahunan terkuat dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat sejak tahun 1984. Secara keseluruhan, upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi melalui peningkatan PDB didorong oleh aktivitas konsumen sebesar 5,3% dan investasi bisnis, produk

properti intelektual, inventaris, dan investasi perumahan (Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2022).

Pada bulan Maret, April, dan Mei 2022, Indeks Harga Konsumen (CPI) berada di atas 8%. Sementara, inflasi di bulan Maret turun menjadi 8,3% dari yang sebelumnya berada pada angka 8,5%. Namun, pada bulan Mei kembali meningkat sebesar 8,6% yang merupakan angka tertinggi dalam 40 tahun sejarah Amerika Serikat. Laju kenaikan harga yang terus berlanjut memberikan tekanan bagi *Federal Reserve* untuk menaikkan suku bunga secara agresif, demi mengatasi inflasi. Laporan ekonomi Amerika Serikat juga mencatat bahwa defisit perdagangan yang melebar pada kuartal pertama tahun 2022. Defisit perdagangan dipicu oleh besaran margin pertumbuhan impor yang melampaui pertumbuhan ekspor, sehingga menyebabkan PDB turun sebesar 1,5% (Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2022).

Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan persediaan energi Amerika Serikat akibat pandemi Covid-19 yang memengaruhi dinamika perdagangan global. Selain itu, invasi Rusia atas Ukraina memaksa Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, sehingga pasokan minyak dan energi yang masuk ke Amerika Serikat dari Rusia pun berkurang. Kebijakan tersebut tentu saja mempengaruhi perekonomian regional Amerika Serikat, terutama pada sektor impor energi. Jika Federal Reserve memaksa menaikkan suku bunga, sementara persoalan perang dan rantai pasokan belum terselesaikan, terdapat kemungkinan kontraksi pada perekonomian Amerika Serikat (The Emirates Policy Center, 2022). Dengan demikian, pemerintahan Biden pun harus mencari alternatif pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Iran merupakan salah satu negara yang berpeluang untuk mengimbangi posisi Rusia sebagai pemasok energi ke Barat selama konflik Rusia-Ukraina berlangsung. Untuk mewujudkan cita-cita menggantikan posisi Iran sebagai negara pemasok minyak dan energi bagi bangsa Barat, Iran yang merupakan salah satu pendukung Rusia dalam perang Rusia-Ukraina, beralih menjadi negara yang netral dan meninggalkan dukungan bagi Rusia. Meskipun Biden melanjutkan penerapan sanksi ekonomi terhadap Iran, *U.S. Energy Information Administration* mengungkapkan Amerika Serikat turut mendorong negara lain untuk mengimpor minyak dari Iran. Pada bulan Maret 2021, tercatat aktivitas impor minyak Amerika Serikat dari Iran sebanyak 1 juta barel minyak mentah (The Emirates Policy Center, 2022). Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bagaimana kapasitas ekonomi memainkan peranannya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran. Penafsiran kapasitas ekonomi suatu negara dapat diukur melalui pola pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan antara kebutuhan dasar masyarakat dan sumber daya yang tersedia, serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Coplin & Marbun, 1992).

Beralih kepada kapasitas militer domestik yang memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, terdapat tiga aspek yang dapat menjadi indikator dalam menilai kapasitas militer negara, yaitu tingkat penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri, dan kestabilan situasi domestik. Tiga kriteria penting yang dapat menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar tingkat penggunaan kekuatan militer suatu negara adalah jumlah personil militer, kelengkapan persenjataan, dan pelatihan

pasukan bersenjata. Perlengkapan senjata dan personil militer yang memadai tidak serta merta menggambarkan besarnya kekuatan militer suatu negara. Pelatihan pasukan bersenjata bukan hanya sekedar persoalan keterampilan teknis dalam memanfaatkan fasilitas militer, melainkan juga meliputi kapasitas personil untuk bertempur dalam kondisi prima dan ketepatan pengambilan keputusan di medan perang. Selain menganalisa penggunaan kekuatan militer, Coplin juga menjelaskan pentingnya melihat sumber kekuatan militer tersebut, apakah berasal dari sumber asing atau dari dalam negara itu sendiri. Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara pemasok utama perlengkapan fasilitas militer. Ketergantungan negara terhadap pemasok sumber daya militer tidak hanya berfokus pada pengadaan alat, tetapi juga melibatkan pengadaan suku cadang, pemeliharaan di masa perang dan damai, serta konsultasi militer. Untuk itu, negara-negara pemasok juga memiliki pengaruh dalam pencetusan kebijakan militer negara penerima pasokan. Kalkulasi kapasitas militer negara dilanjutkan dengan menelaah keterkaitan antara ancaman stabilitas domestik dan kemampuan militer. Ancaman stabilitas domestik akan berimbas pada penurunan kemampuan negara untuk terlibat dalam aktivitas militer internasional (Coplin & Marbun, 1992).

Menurut Coplin, ini merupakan salah satu instrumen politik internasional paling aktual untuk menggambarkan eksistensi suatu negara. Ketika negara memiliki kapasitas militer yang unggul, hal ini memberikan mereka landasan untuk mengambil peran-peran yang lebih proaktif dalam menangani isu-isu global, serta untuk berpartisipasi dalam negosiasi dan kesepakatan global. Oleh karena itu, kapasitas militer menjadi salah satu indikator krusial dalam mengukur

potensi dan kemampuan suatu negara. Meskipun kapasitas militer suatu negara tidak serta merta ditentukan oleh kekuatan militer semata, faktor perkembangan teknologi militer, kemampuan personel militer, dan modernisasi persenjataan turut memainkan peran dalam menentukan posisi negara di panggung internasional (Coplin & Marbun, 1992).

Kebijakan luar negeri yang diimplementasikan oleh pemerintahan Biden sendiri berkaitan erat dengan peningkatan infrastruktur domestik. Peningkatan tersebut diperlukan bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni global. Berdasarkan “*Interim National Security Strategic Guidance*” yang dikeluarkan oleh *the White House Government*, pemerintahan Biden memprioritaskan penguatan aliansi dan kerjasama diplomatik sebagai upaya untuk mengatasi isu stabilitas internasional dan regional, memperluas jaringan, dan peningkatan investasi. Dalam menanggapi program pengembangan nuklir Iran yang dinilai sebagai agresi, Amerika Serikat menggunakan strategi kerjasama regional dengan didasarkan pada instrumen kedaulatan negara. Di kawasan Timur Tengah, Amerika Serikat berkomitmen mengatasi isu stabilitas keamanan dan kedaulatan aliansi, sembari mengupayakan langkah integrasi dengan negara-negara lain di kawasan tersebut untuk mencapai resolusi terkait isu yang dihadapi dan menindaklanjuti kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan dan ideologi Amerika Serikat. Untuk itu, pemerintah Biden mengambil langkah menarik dukungan atas operasi militer di Yaman, meredam perkembangan jaringan teroris al-Qaeda, menghalau kebangkitan kekuatan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), dan mendukung upaya PBB untuk mengakhiri aktivitas gencatan senjata (The White House, 2021).

Eksistensi program nuklir Iran sebagai salah satu ancaman bagi stabilitas internasional. Sejak awal masa jabatan, Biden telah berkoordinasi bersama Israel dalam mencari alternatif yang dapat membatasi pengembangan nuklir Iran. Biden menginginkan penyelesaian secara diplomatik, namun tetap membutuhkan kemampuan dan kekuatan di bidang militer. Pada Januari 2021, Pentagon memerintahkan USS Nimitz untuk tetap berada di wilayah operasi komando sentral di Timur Tengah. Berdasarkan pernyataan Sekretaris Pertahanan, Lloyd J. Austin, Biden memastikan kesiapan angkatan militer apabila rencana dan pilihan militer diperlukan. Departemen pertahanan Amerika Serikat turut menjalin kerja sama dengan kementerian pertahanan Israel. Lebih dari 7.000 personel bersenjata terlibat dalam Juniper Oak 23.2, pelatihan militer terbesar yang diadakan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk memastikan kesiapan kekuatan militer keduanya dalam situasi darurat, terutama di kawasan Timur Tengah (Lopez, 2023).

Selama periode tahun 2021 hingga tahun 2022, dilaporkan Amerika Serikat telah mengambil langkah tegas dengan mengirim serangan balik kepada entitas yang berhubungan dengan Iran, yaitu pada Juni 2021 di Irak, Februari 2021, Juni 2021, Januari 2022, dan Agustus 2022 di Suriah. Pasukan angkatan laut Amerika Serikat turut berpartisipasi dalam penghentian logistik senjata yang berasal dari Iran. Pada Agustus 2022, upaya penguatan kerjasama di kawasan Timur Tengah dilakukan melalui penjualan 300 senjata rudal patriot kepada Arab Saudi dengan nilai \$3 miliar dan 96 rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) sebesar \$2,2 miliar kepada Uni Emirat Arab (Humud & Thomas, 2023). Sedangkan pada aktivitas impor di sektor militer, Amerika Serikat tercatat sebagai negara nomor 7 paling banyak melakukan impor persenjataan. Total yang

dikeluarkan sebanyak \$53.7 juta untuk persenjataan militer, dengan rincian \$16.4 juta impor dari Switzerland, \$14 juta dari Jerman, \$3.04 juta dari Austria, \$2.6 juta dari Korea Selatan, dan \$2.15 juta total belanja di Colombia (the Observatory of Economic Complexity, 2021)

Dinamika kapasitas ekonomi dan militer yang digambarkan Coplin sebagai determinan yang saling memengaruhi dan berkaitan kompleks dengan perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun kapasitas ekonomi dan militer memiliki peranan penting, pada umumnya keunggulan tersebut tidak dengan sendirinya menyajikan keberhasilan dalam pencapaian kepentingan nasional. Pencapaian tujuan nasional melibatkan sejumlah variabel kompleks, seperti strategi diplomatik yang efektif, pemahaman terhadap dinamika regional dan global, serta kerjasama internasional (Coplin & Marbun, 1992).

3.2 Konteks Internasional

William D. Coplin menjelaskan konteks internasional sebagai karakteristik sistem internasional dan dinamika hubungan antar negara yang memengaruhi tindakan suatu negara. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa tindakan suatu negara tidak dapat dipisahkan oleh kondisi global yang memengaruhinya. Keputusan suatu negara tidak semata-mata didasarkan pada situasi regional, melainkan juga mendapat pengaruh dari situasi di panggung internasional yang membentuk perilaku, preferensi, dan prioritas negara. Untuk itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri, para pencetus kebijakan harus memiliki pemahaman terkait konteks internasional.

Menurut Coplin, terdapat tiga determinan konteks internasional yang memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, yaitu geografis, politis, dan

ekonomis. Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan dalam menganalisa perilaku, preferensi, dan prioritas negara. Dimensi geografis didasarkan atas kalkulasi proksimitas hubungan perdagangan antarnegara, pola pemberian suara sebagai negara anggota PBB, dan keanggotaan dalam organisasi antarpemerintah. Negara-negara yang berdekatan secara geografis cenderung menjalin hubungan perdagangan dan menimbulkan tercetusnya kepentingan bersama. Hal ini memengaruhi negara untuk bersikap serupa dalam pemungutan suara di sidang-sidang PBB, demi mewujudkan kepentingan bersama. Selain itu, kepentingan yang sama juga mendorong negara-negara untuk bergabung dalam keanggotaan organisasi antarpemerintah. Selanjutnya Coplin mencoba menjelaskan bagaimana hubungan politik dalam konteks internasional dapat memengaruhi proses perumusan kebijakan. Melalui komitmen hubungan politik yang terjalin antar negara menciptakan sebuah aliansi yang dapat mendukung pencapaian tujuan. Pengaruh yang diberikan oleh keterbentukan aliansi tidak hanya memengaruhi negara-negara anggota, perubahan dinamika juga berdampak pada negara-negara di luar keanggotaan aliansi, terutama yang menyangkut pasukan-pasukan di wilayah asing. Pada persoalan ekonomis dalam konteks internasional, arus barang dan jasa serta arus modal mendorong karakteristik hubungan yang saling bergantung antar negara. Dalam bidang perdagangan dan bantuan, negara-negara terbelakang cenderung bergantung kepada negara maju (Coplin & Marbun, 1992).

Sebelum melanjutkan penjelasan mengenai konteks internasional yang memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran. Penulis akan terlebih dahulu menjabarkan penjelasan singkat mengenai sejarah hubungan diplomatik antara Amerika

Serikat dan Iran yang berujung pada ratifikasi JCPOA. Amerika Serikat dan Iran telah menjalin hubungan bilateral sejak beberapa dekade terakhir, terlebih dalam kaitannya dengan program pengembangan teknologi nuklir. Namun, tercetusnya revolusi Republik Islam Iran pada tahun 1979 di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini, berhasil mendorong Iran untuk melepaskan diri dari belenggu hegemoni Amerika Serikat yang mengontrol sektor perekonomian serta politik Iran, terutama dominasi atas sumber-sumber minyak sejak kedudukan rezim Shah Reza Pahlevi. Adanya perubahan dalam pemerintahan Iran memicu respon koersif dari Amerika Serikat, sehingga berujung pada penetapan kebijakan embargo terhadap Iran (Assri, 2020).

Amerika Serikat kini berbalik menentang keberlanjutan pengembangan teknologi nuklir tersebut. Ambisi serta perkembangan program nuklir Iran kerap menimbulkan kekhawatiran besar bagi Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Aktivitas pengembangan nuklir Iran juga menjadi ancaman bagi hegemoni Amerika Serikat, khususnya di kawasan Timur Tengah. Tercetusnya JCPOA pada era pemerintahan Barack Obama dinilai sebagai jalan keluar untuk mengatasi polemik kepemilikan nuklir Iran. Namun, setelah kursi kepemimpinan jatuh kepada Trump, Amerika Serikat resmi melakukan penarikan diri secara sepihak dari keanggotaan JCPOA tanpa melibatkan keputusan negara-negara anggota lainnya. Trump menilai ambisi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir semakin agresif dengan adanya JCPOA, terlebih saat Iran melakukan uji coba rudal balistik. Sementara, sebagai negara anggota JCPOA, Amerika Serikat tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi baru selama hasil penyelidikan IAEA

atas aktivitas pengembangan nuklir Iran mendapatkan hasil yang baik (Paramasatya & Wiranto, 2019).

Di tengah transisi kepemimpinan Amerika Serikat, kekhawatiran akan eksistensi program pengembangan nuklir Iran tak kunjung surut. Dalam kompleksitas dan ketidakpastian yang terus berkembang, isu program pengembangan nuklir Iran akan terus menjadi sorotan utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya di kawasan Timur Tengah. Beberapa pertimbangan menjadi dasar kebijakan luar negeri di era pemerintahan Biden, salah satunya adalah determinan geografis dan politis dalam konteks internasional berikut. Secara geografis Amerika Serikat dan Iran tidak berada dalam satu teritori, namun menurut Coplin, determinan geografis dalam konteks internasional juga dipengaruhi oleh kepentingan yang sama antar negara-negara anggota organisasi antarpemerintah. Untuk itu, stabilitas regional Israel sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah, menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran. Isu tersebut memengaruhi upaya diplomasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Setelah Revolusi Islam di tahun 1979, Iran mengubah retorika anti-Amerika dan anti-Israel sebagai elemen inti dari identitas politiknya (Saragih, 2017).

Israel merupakan sekutu lama Amerika Serikat di Timur Tengah. Munculnya babak baru dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada masa pemerintahan Joe Biden, mendorong Israel untuk mempertegas kembali posisinya. Israel mengambil pendekatan serupa dengan yang diambil oleh AIPAC terhadap komitmen Biden untuk kembali bergabung dalam JCPOA. Melalui Penasihat

Comment [T-18]: Israel apakah termasuk pol. domestik, kalo enggak maka ini erlu digeanti.

Comment [T-19]: <https://jewishcurrents.org/a/c-refuses-to-learn-from-its-mistakes-on-iran>

Comment [T-20]: <https://www.haaretz.com/us-news/2021-12-05/ty-article/.premium/what-aipac-telling-congress-on-bidens-iran-negotiations/0000017f-f831-d47e-a37f-f93d07a90000>

Keamanan Nasional Israel, Meir Ben Shabbat, yang diutus pada perundingan via telepon dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan pada sabtu, 23 Januari 2021 untuk membahas isu kembalinya Amerika Serikat dalam perjanjian nuklir Iran. Pada pembicaraan tersebut Israel mencoba untuk melobi Amerika Serikat dan menegaskan kembali komitmen Joe Biden dalam menjaga keamanan nasional Israel yang dapat terancam apabila perjanjian nuklir Iran dihidupkan kembali. Bahkan Israel berkomitmen akan menyelenggarakan konsultasi bilateral untuk membahas seluruh isu regional maupun internasional. Tak hanya itu, Yossi Cohen, Direktur *Mossad* menjadwalkan kunjungan ke Washington DC pada beberapa pekan setelahnya untuk menemui William Burns, Direktur *Central Intelligence Agency* (CIA) dan Presiden Joe Biden guna membahas pandangan Israel terhadap isu aktivitas pengembangan nuklir Iran (Rahman, 2021).

Kekhawatiran Amerika Serikat juga didasarkan atas potensi penyebaran teknologi nuklir Iran kepada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutu di kawasan Timur Tengah. Terkait dengan kepemilikan misil balistik, Iran telah secara agresif mengembangkan kapasitas misil balistik. Diperkirakan Iran mempunyai misil balistik dengan jangkauan dan akurasi melebihi 3.000 kilometer, angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Iran menyediakan ribuan roket dan misil jarak pendek untuk Hezbollah Lebanon yang digunakan dalam konflik bersenjata dengan Israel. Tak hanya itu, Iran berupaya memperkuat hubungan ekonomi-militer dengan Tiongkok dan Rusia, salah satunya dengan mengekspor drone untuk kepentingan operasi militer Rusia di

Ukraina. Kesepakatan Iran pada Maret 2023 untuk memulihkan hubungan dengan Arab Saudi, yang dimediasi oleh Tiongkok, juga memiliki implikasi bagi kepentingan Amerika Serikat. Di samping itu, IRGC turut menyediakan persenjataan, pelatihan, dan dukungan kepada proxy regional dan kelompok bersenjata. Eksistensi program nuklir memberikan Iran pengaruh dan legitimasi yang lebih besar di panggung internasional (Thomas, 2023). Hal ini menambah daftar panjang ancaman destabilitas regional Israel akibat program pengembangan nuklir yang dicituskan oleh Iran.

Pada 24 Februari 2022, Rusia secara resmi memulai invasi atas Ukraina dengan melakukan operasi militer khusus di perbatasan antara kedua negara. Tak sedikit negara mengecam tindakan Rusia yang dinilai melanggar sejumlah hukum kontemporer internasional. Negara-negara memutuskan penjatuhan sanksi ekonomi untuk mendorong penghentian invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejak awal mencuatnya isu invasi Rusia atas Ukraina, Amerika Serikat kerap mengagendakan sidang senat untuk membahas sanksi ekonomi yang akan diberlakukan kepada Rusia. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi yang berfokus pada penurunan nilai Rubel Rusia, melemahkan perekonomian domestik, dan membatasi aktivitas Rusia dalam sistem keuangan global. Namun, penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Rusia sebagai negara pemasok minyak dan gas, memanfaatkan ketergantungan negara-negara Barat terhadap sumber energinya. Berdasarkan pernyataan Mikhail Popov, Wakil Sekertaris Dewan Keamanan Rusia, tercatat di akhir Maret 2022 total impor minyak mentah yang masuk ke Amerika Serikat dari Rusia meningkat sebanyak 43%. Rusia juga memberlakukan Rubel sebagai mata uang dalam

transaksi ekspor minyak. Akibatnya terjadi lonjakan harga jual minyak dan gas, sehingga memengaruhi biaya manufaktur di berbagai industri. Amerika Serikat juga terpaksa memberhentikan kegiatan impor gas alam, dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan warga negaranya (Zulfa, Arisanto, & Mahadana, 2022). Penerapan sanksi ekonomi justru memperjelas kebergantung Amerika Serikat terhadap pasokan minyak dan gas dari Rusia dengan adanya penurunan pasokan minyak dan gas.

Keberlanjutan ambisi Iran dalam program pengembangan nuklir menghalangi upaya negosiasi Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir, Kongres telah menetapkan prioritas kebijakan pada sanksi dan JCPOA. Pelonggaran sanksi ekspor minyak Iran dinilai hanya akan memberikan dukungan bagi pendanaan pengembangan militer dan represi domestik. Seperti yang terjadi di tahun 2015-2017, setelah Iran menerima kelonggaran sanksi, miliaran dolar dialihkan pemerintah Iran pada pendanaan ke rekening militer untuk kegiatan yang mendukung kelompok teror. Ketika konsensi dianggap tidak memadai oleh Iran, aktivitas pengayaan uranium akan kembali di atas level yang diperbolehkan dan memungkinkan pengembangan infrastruktur nuklir sebagai modal membangun kembali perekonomian regional Iran (Noronha, Misztal, & Ruhe, 2023).

Situasi-situasi internasional di atas telah menggambarkan bagaimana konteks internasional memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri. Coplin menjelaskan bahwa konteks internasional membantu menggambarkan keterkaitan politik luar negeri suatu negara secara parsial dengan perhitungan pada determinan situasi geografis, politis, dan ekonomis. Kondisi geografi

menjelaskan hubungan proksimitas hubungan perdagangan serta keanggotaan dalam organisasi regional dan internasional. Pada bagian penting dalam hubungan-hubungan ekonomi di konteks internasional, peran ini tergambar jelas melalui perhitungan arus barang dan jasa maupun arus modal. Fenomena ini mencerminkan ketergantungan antar negara, di mana tindakan dan kebijakan ekonomi suatu negara dapat berdampak signifikan bagi negara lainnya. Terakhir, dalam konteks hubungan politik suatu negara, salah satu elemen krusial dalam dinamika ini adalah pembentukan aliansi. Aliansi memiliki potensi untuk membentuk ulang langskap politik di skala global, sebab dampak signifikan tidak terbatas hanya bagi negara anggota, negara-negara di luar keanggotaan aliansi juga terkena dampak tersebut. Oleh karena itu, interaksi politik antar negara yang mengakibatkan pembentukan aliansi memainkan peranan sentral dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Keberadaan aliansi memengaruhi posisi, prioritas, tujuan, dan pendekatan dalam isu-isu global (Coplin & Marbun, 1992).

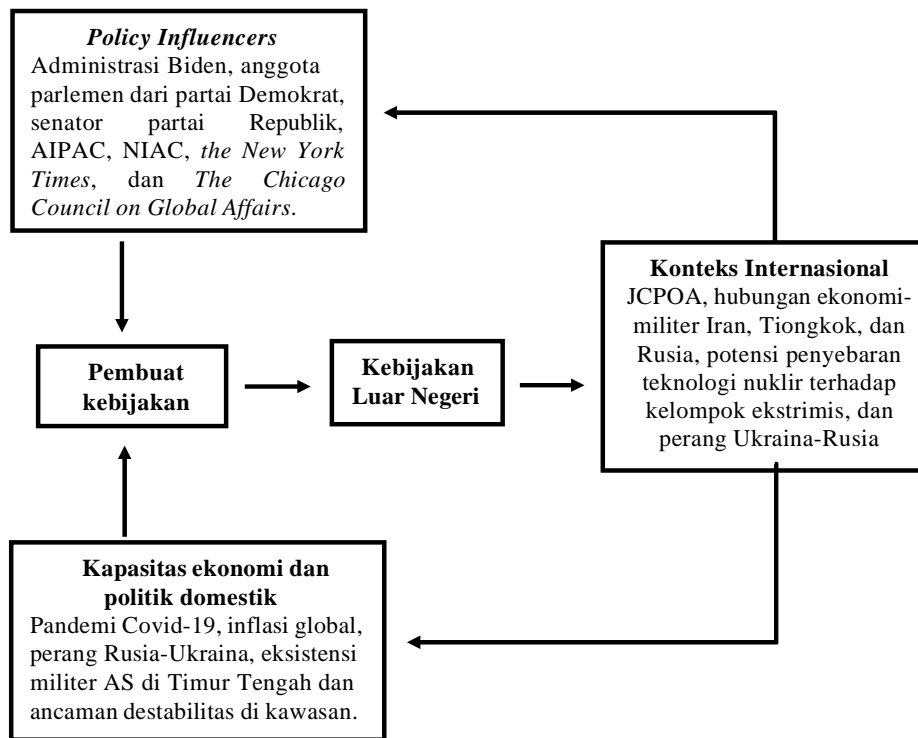
BAB IV

PENUTUP

Comment [K21]: bagan yang ada di bab 1 dimasukkan dalam konteks si nuclear deal.

4.1 Kesimpulan

Hubungan kerja sama bilateral Amerika Serikat dan Iran dalam kaitannya dengan program pengembangan nuklir telah terjalin sejak beberapa dekade terakhir. Namun, reformasi pemerintah Iran mengakibatkan keretakan dalam hubungan kedua negara dan mendorong Amerika Serikat untuk berbalik menolak program pengembangan nuklir Iran. Tercetusnya JCPOA pada masa pemerintahan Obama dinilai sebagai keberhasilan dalam mengatasi ambisi nuklir Iran. Namun, di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat mengambil langkah sepihak untuk keluar dari perjanjian tersebut. Kembalinya Biden ke gedung putih dengan membawa harapan dalam stabilitas hubungan bilateral Amerika Serikat dan Iran melalui janji kampanye untuk memperjuangkan pemulihan JCPOA. Hingga saat ini, dinamika hubungan bilateral Amerika Serikat dan Iran masih terus mewarnai panggung internasional. Penelitian ini telah berupaya menjawab rumusan masalah “bagaimana proses pencetusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Joe Biden terkait program pengembangan nuklir Iran?” melalui perspektif *Decision Making Theory* yang dikemukakan oleh William D. Coplin. Berdasarkan penjelasan Coplin, terdapat tiga konsideran yang memengaruhi dinamika perumusan kebijakan luar negeri, yaitu situasi politik domestik, kapasitas ekonomi dan militer domestik, serta konteks internasional.



Gambar 2. *Decision Making Process Theory* dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran.

Comment [T-22]: bagan disesuaikan dengan margin halaman (kiri dan kanan)

Pada konsideran situasi politik domestik didasarkan atas hubungan timbal balik antara *decision maker* dan *policy influencers* yang meliputi *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Pemerintahan Biden sebagai *bureaucratic influencers* dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, menerapkan upaya untuk membangun kembali hubungan kerja sama multilateral yang mengadopsi strategi peningkatan keterlibatan diplomatik. Karena alasan tersebut pemerintahan Biden memulai negosiasi untuk menghidupkan kembali JCPOA. Perumusan keputusan juga

memerlukan peranan dari *partisan influencers* dengan menyediakan pandangan dan alternatif kebijakan, serta legitimasi rumusan kebijakan luar negeri. Dalam kasus ini, anggota-anggota parlemen dari partai Demokrat dan Republik menolak upaya Biden untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan pertimbangan potensi destabilisasi regional dan global. Selanjutnya, menurut Coplin, pada sistem politik terbuka seperti yang dianut oleh Amerika Serikat, *interest influencer* mengambil peranan krusial dalam proses perumusan kebijakan melalui dukungan publik dan kemampuan memengaruhi *bureaucratic influencers* dan *partisan influencers*, serupa dengan tindakan AIPAC dan NIAC yang mendorong pemenuhan agenda kepentingannya dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sedangkan, *the New York Times*, dan *The Chicago Council on Global Affairs* sebagai *mass influencers* atau instrumen agar masyarakat merasionalisasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh *policy influencers* dan *decision maker*. Proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran di tahun 2021 hingga tahun 2022 dipengaruhi oleh instrumen politik domestik yang bersifat kompleks dan saling memengaruhi.

Pada konsideran kapasitas ekonomi dan militer domestik, perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh inflasi global yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi internasional. Pemerintah Amerika Serikat menetapkan pemulihan ekonomi sebagai prioritas dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022 menyebabkan penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Hal ini turut menyebabkan kurangnya pasokan minyak dan energi yang masuk ke Amerika Serikat. Pemerintahan Biden terpaksa mencari alternatif rantai pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan

masyarakatnya. Amerika Serikat berupaya mendekati Iran secara diplomatis sebagai salah negara pemilik pasokan energi. Hal ini menunjukkan bagaimana kapasitas pemenuhan kebutuhan nasional negara memengaruhi alur kebijakan luar negeri. Coplin menjelaskan bahwa perumusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh situasi ekonomi domestik melalui kapasitas produksi barang dan jasa serta tingkat ketergantungan negara terhadap perdagangan dan finansial internasional. Sedangkan kapasitas militer domestik didasarkan atas kalkulasi tingkat penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri, dan kestabilan situasi domestik. Biden turut memperhitungkan peningkatan infrastruktur domestik sebagai salah satu prioritas kebijakan. Langkah tersebut didasarkan pada ambisi untuk mempertahankan hegemoni dan stabilitas nasional. Biden berkomitmen untuk meningkatkan aliansi dan kerja sama di kawasan Timur Tengah. Dalam menghadapi eksistensi program nuklir Iran yang dinilai sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan dan kedaulatan kawasan, Biden bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengatasi ancaman yang dinilai bertentangan dengan kepentingan dan ideologi Amerika Serikat. Coplin mengatakan bahwa kapasitas militer yang unggul memberikan landasan bagi negara untuk terlibat secara proaktif dalam isu-isu, negosiasi dan kesepakatan global.

Selanjutnya, Coplin menjelaskan pertimbangan konteks internasional yang terbentuk melalui hubungan antara sistem internasional dan dinamika hubungan antar negara. Dengan kata lain, tindakan suatu negara tidak dapat dipisahkan dan akan selalu dipengaruhi oleh situasi global yang mendorong pembentukan perilaku, preferensi, dan prioritas negara. Terdapat tiga determinan dalam konteks

internasional yang dapat menggambarkan proses perumusan kebijakan luar negeri, yaitu geografis, politis, dan ekonomis. Determinan geografis terbentuk atas kalkulasi proksimitas hubungan perdagangan antarnegara, pola pemberian suara sebagai negara anggota PBB, dan keanggotaan dalam organisasi antarpemerintah. Kepentingan yang serupa mendorong negara untuk bergabung dalam keanggotaan organisasi nonpemerintah, dan menyamakan suara dalam pemungutan suara di sidang-sidang PBB. Untuk itu, Biden mengupayakan pemulihan JCPOA demi mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat. Bila ditinjau secara geografis, Amerika Serikat dan Iran tidak berada dalam satu teritori. Namun, Israel sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah berhadapan secara langsung dengan ancaman stabilitas regional akibat program pengembangan nuklir Iran.

Kekhawatiran Amerika Serikat akan ambisi pengembangan nuklir Iran juga didasarkan atas potensi penyebaran teknologi nuklir Iran kepada kelompok-kelompok ekstrimis yang bertentangan paham dengan Amerika Serikat dan aliansinya di kawasan Timur Tengah, ditambah persoalan tentang kepemilikan Iran akan rudal balistik dengan akurasi jangkauan sebesar 3.000 kilometer. Tak hanya itu, upaya Iran untuk melawan hegemoni Amerika Serikat ditunjukkan dengan langkah mempererat hubungan ekonomi-militer bersama Tiongkok dan Rusia, salah satunya dengan mengekspor drone yang digunakan Rusia sebagai persenjataan untuk menginvasi Ukraina. Eksistensi program nuklir Iran memberikan dampak yang signifikan terhadap kedudukan dan pengakuan yang dimilikinya di panggung internasional. Program pengembangan nuklir ini menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Iran dalam kerja sama global dan membuka

jalan bagi partisipasinya dalam dialog dan perundingan internasional. Keberadaan program nuklir Iran menjadi landasan bagi Iran untuk memiliki peran yang signifikan dalam organisasi-organisasi internasional dan kerangka kerja diplomasi global. Untuk itu Amerika Serikat mencoba menekan perluasan pengaruh Iran melalui penerapan berbagai sanksi. Seluruh situasi internasional yang dijelaskan telah menggambarkan implikasi sistem internasional dan dinamika hubungan antar negara terhadap proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada pemerintahan Joe Biden di tahun 2021 hingga 2022.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Untuk itu, penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika hubungan Amerika Serikat dan Iran terkait program pengembangan nuklir. Selama masa kampanye, Presiden Biden memberikan kecaman terhadap kebijakan luar negeri Presiden Trump yang dinilai terlalu agresif terhadap Iran. Akan sangat menarik apabila penelitian selanjutnya dapat menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri yang diterapkan selama masa kepemimpinan Presiden Biden dan Presiden Trump. Terdapat perbedaan gaya kepemimpinan antara Presiden Biden dan Presiden Trump, sehingga apabila ditelusuri perbandingannya akan dapat menggambarkan determinan yang memengaruhi tercetusnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Biden dan Presiden Trump serta efektivitas kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. F. (2019). Kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran Pasca Mundurnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
- Agustina, B. K. (2019). Kebijakan Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama Terkait Program Nuklir Iran.
- Andra, G. D. (2019). Kebijakan Amerika Serikat terhadap Sanksi kepada Iran terkait Pengembangan Senjata Nuklir Ditinjau dari Hukum Internasional.
- Assri, B. C. (2020, Juni). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Iran Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal ICMES*, 4(1), 32-33.
- Auliani, P. A. (2013, September 28). Bersejarah, Presiden Amerika dan Iran Bicara di Telepon.
- CNN. (2020, September 13). Joe Biden: There's a smarter way to be tough on Iran.
- Coplin, W. D., & Marbun, M. (1992). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Coplin, W. D., Merget, A. E., & Bourdeaux, C. (2002). *The Professional Researcher as Change Agent in the Government-Performance Movement* (Vol. 62). *Public Administration Review*.
- Craig, C., & Ruzicka, J. (2013). The Nonproliferation Complex. *Ethics & International Affairs*, 27(3).
- Desiderio, A. (2022, Maret 22). Dems Start Questioning Biden Admin's Iran Nuclear Talks.

- Desiderio, A. (2022). 'The President will Get His Way': Congress Likely Can't Stop New Iran Nuke Deal. *Congress*.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). (2022). *United States Economic Outlook: 2021 Year-in-Review and First Quarter of 2022*.
- Foreign Relations Committee. (2022). *49 Senate Republicans Tell President Biden: An Iran Agreement Without Broad Congressional Support Will Not Survive*. Washington.
- Geranmayeh, E. (2022, April 13). Iran, the US, and the Nuclear Deal: Biden's Choice to Remove Trump's Poison Pill. *Middle East and North Africa*.
- Hansler, Jennifer; Atwood, Kylie; CNN. (2021, January 29). Biden taps Iran envoy to face challenges of confronting both Tehran and polarized views at home.
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.
- Humud, C. E., & Thomas, C. (2023, March 23). Iran: Background and U.S. Policy. *Congressional Research Service*.
- Jatuhkan Kembali Sanksi, Babak Baru "Perang Tanpa Darah" AS dan Iran. (2020, 09 21). *DW.com*. Retrieved from <https://amp.dw.com/id/jatuhkan-kembali-sanksi-babak-baru-perang-tanpa-darah-as-iran/a-55003868>
- Lipin, M., Yazdian, P., & Bakhtiar, H. (2022, November 10). US Midterms Seen Maintaining Congress' Bipartisan Support for Iran's People; Impact on Biden Nuclear Policy Unclear.

- Lopez, C. T. (2023, Juni 5). Defense Official Say U.S. Remains Committed to Middle East.
- Magid, J. (2022, Desember 20). Video Surfaces of Biden Saying Iran Nuclear Deal is 'Dead'; White House doesn't Deny.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (1st ed.). Alfred A. Knoff, Inc.
- Mumtazinur. (2016, Maret). Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Memberantas Terorisme pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush. *AL-IJTIMA'-International Journal of Government and Social Science*, 1(2).
- National Iranian American Council. (2022, Oktober 15). Where NIAC Stands and Has Always Stood.
- Ni'matul, D. M. (2017). Program Nuklir Iran: Kajian Konflik Nuklir Iran dengan Negara P5+1.
- Nissenbaum, Dion; Wall Street Journal. (2023, January 26). U.S., Israel Send Message to Iran with Biggest-Ever Military Exercises.
- Noronha, G., Misztal, B., & Ruhe, J. (2023). *What's in Biden's New Nuclear "Not-a-Deal" with Iran?* The Jewish Institute for National Security of America.
- Nurtyandini, R. T. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Joe Biden terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran. *Jurnal PIR*, Vol. 6, No. 2.
- Paramasatya, S., & Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, XII(2).

- Purnama, A. M. (2019). Faktor Pendorong Penarikan Diri Amerika Serikat dari Perjanjian Nuklir (Joint Comprehensive Plan of Action) dengan Iran pada Tahun 2018.
- Rahman, M. A. (2021, Januari 26). Iran-Israel Bertarung Keras Soal Isu Nuklir, Netanyahu Kirim Tim Pelobi ke AS.
- Samuels, B. (2021, Desember 5). What AIPAC is Telling Congress on Biden's Iran Negotiations.
- Sanger, D. E., Jakes, L., & Fassihi, F. (2021, Juli 31). Biden Promised to Restore the Iran Nuclear Deal. Now It Risks Derailment.
- Saragih, H. M. (2017). Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Amerika Serikat dalam Program Nuklir Iran pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani. *Jurnal Interdependence*, 5(1).
- Shafar, W. I., & Mutmainah, D. (2020). Resistensi Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat dan Iran: Studi Kasus Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 7 No. 1.
- Smeltz, D., & Sullivan, E. (2022, September). Americans Support a US Return to Iran Deal. *Lester Crown Center on US Foreign Policy*.
- Sorongon, T. (2021, June 24). Iran Sebut Biden Setuju Hapus Sanksi Minyak, AS: No Deal! *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210624080944-4-255508/iran-sebut-biden-setuju-hapus-sanksi-minyak-as-no-deal>
- State, U.S. Department of. (2021, Januari 15). Increasing Iran Metals Sanctions Targeting Iran's Nuclear, Military, and Ballistic Missile Programs and the IRGC.

- Sundari, R. (2020). Strategi Amerika Serikat dalam Menekan Pengembangan Nuklir Iran. *Frequency of International Relations, Vol. 1 No. 2*.
- Tabatabai, A. (2020, Agustus). Nuclear Decision-Making in Iran: Implications for US Nonproliferation Efforts.
- Tharoor, I. (2022, August 26). Is the Iran deal worth salvaging?
- The Emirates Policy Center. (2022, Juni 30). The Impact of the Russo-Ukrainian War on Iran's Oil Exports.
- The White House. (2021). *Interim National Security Strategic Guidance*. Washington.
- The White House. (2022). *The Biden-Harris Economic Blueprint*. Washington: The White House.
- Thomas, C. (2023). *Iran: Background and U.S. Policy*. Congressional Research Service.
- Thompson, K., & Thränert, O. (2017). Trump Preparing to End Iran Nuke Deal. *Policy Perspectives, Vol. No. 4*.
- Zulfa, K. K., Arisanto, P. T., & Mahadana, K. R. (2022). Analisis Sanksi Ekonomi terhadap Rusia Atas Invasinya di Ukraina 2022. *Jurnal Transformasi Global, 9(2)*.